



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENTAN RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



# **REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**



**TAHUN 2016 - 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan infrastruktur jalan, cipta karya dan tata ruang yang berkelanjutan, dan diharapkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini bermanfaat bagi kita.

Padang, Juni 2017  
**KEPALA DINAS**

**Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng**  
NIP. 19640515 199003 1 010

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT</b> .....	<b>8</b>
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2.Sumber Daya .....	14
2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Barat .....	18
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD Provinsi Sumatera Barat.....	37
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> .....	<b>43</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	43
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	44
3.2. Telaahan Visi, Misi Program Gubernur .....	46
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum .....	54
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.....	54
3.5 Keterkaitan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumatera Barat dengan Visi dan Misi Kementerian PUPR dan Kementerian ATR .....	55
3.6. Telaahan RTRW Provinsi dan KLHS .....	56

3.7.Penentuan Isu-Isu Strategis .....	59
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>61</b>
4.1. Visi dan Misi .....	61
4.2. Tujuan dan Sasaran .....	62
4.3. Strategi dan Kebijakan .....	70
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>74</b>
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Prasjaltarkim .....	74
5.2. Indikator Kinerja .....	80
5.3. Pendanaan Indikatif .....	81
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>82</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 .....	3
Gambar 2. 1 Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai Pria dan Wanita .....	14
Gambar 2. 2 Personil yang Memiliki Sertifikat Penjurusan Karir 2009 dan 2014.....	16
Gambar 2. 3 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015.....	17
Gambar 3. 1 Peta Gagasan Pembentukan Struktur Ruang.....	57
Gambar 3. 2 Peta Pembangunan/Peningkatan Jalan Strategis.....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian Pegawai .....	15
Tabel 2. 2 Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2009, 2014 dan 2015 ....	15
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Barat .....	30
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Prasarana Tarkim Prov. Sumatera Barat Tahun 2010-2015 .....	33
Tabel 3. 1 Hubungan Antara Visi, Misi ke 4, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	48
Tabel 3. 2 Hubungan Antara Visi, Misi ke 5, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	52
Tabel 3. 3 Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Kebijakan Umum dan Program Prioritas Gubernur dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	51
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD .....	64
Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2016-2021 .....	68
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas PU dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahunan (jangka menengah) yang merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Prasarana Jalan, Penataan Ruang dan Permukiman dibagi menjadi dua dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun renstra ini, merupakan revisi dari Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman 2016 – 2021, yang selanjutnya direvisi menjadi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

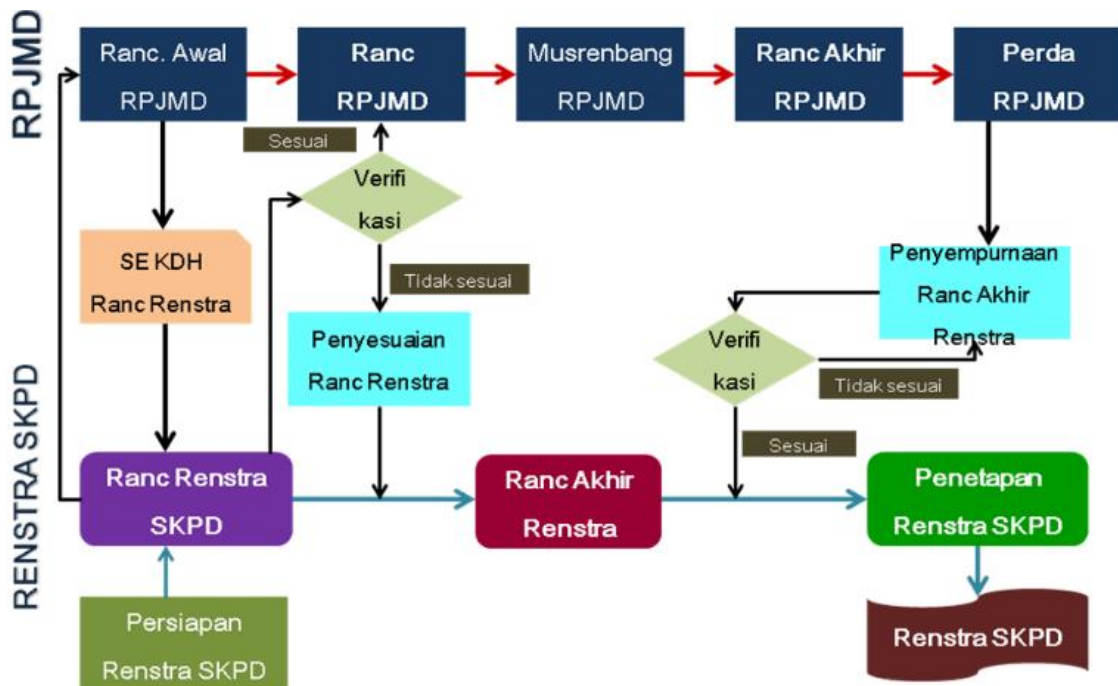
Proses penyusunan Renstra Dinas PU dan Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 –2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi
  - a. Data dan informasi gambaran pelayanan OPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD.
  - b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari:
  - a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;
  - b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
3. *Review* Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:
  - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat (Kementerian PUPera);
  - b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
  - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
  - b. Struktur dan pola ruang;
  - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Stretegis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:



- a. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD);
  - b. Hasil review Renstra K/L;
  - c. Hasil penelaahan RTRW;
  - d. Hasil analisis dokumen KLHS;
  - e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
7. Perumusan visi dan misi OPD;
  8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
  9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas PUPR Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1



**Gambar 1. 1**  
**Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD**  
**berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010**

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 28/2002, tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang No. 18/2004, tentang Jalan
5. Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
6. Undang-Undang No. 26/ 2007, tentang Tata Ruang
7. Undang-Undang No. 18/ 2008, tentang Pengelolaan Sampah
8. Undang-Undang No. 32/ 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang-Undang No. 1/ 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Undang-Undang No. 20/ 2011, tentang Rumah Susun,
11. Undang-undang No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
13. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. PP No. 15/ 2005, tentang Jalan Tol
15. PP No. 36/ 2005, tentang Peraturan, Pelaksanaan Undang - undang Bangunan Gedung
16. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
17. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
18. PP No. 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota
19. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. PP No. 26/ 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
21. Perda No. 4/2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
22. Perda No. 6/ 2011, tentang Bangunan Gedung

23. Perda No. 13/2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-203
24. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
25. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
26. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Permendagri 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13/2006
28. Permendagri No. 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
29. Permen PU NO 02/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019
30. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
31. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 105/2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
- b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.

### 1.3.2 Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

## 1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program gubernur, telaahan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Memuat indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan serta harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD baru yang berasal dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman.

### **2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi**

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, urusan wajib pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

1. Urusan Pekerjaan Umum; dan
2. Urusan Penataan Ruang

#### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **2.1.2 Fungsi**

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang keciptakarya, kebinamargaan serta bidang penataan ruang;
- f. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang keciptakarya, bidang kebinamargaan serta bidang penataan ruang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibantu oleh Sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 2 UPT dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang ada pada sub bagian umum dan kepegawaian serta sub bagian keuangan dan program. Dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD dinas;
- Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinas.

#### b. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan gedung dan rumah dinas, penyehatan lingkungan, serta air minum dan limbah, dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- Menyelenggarakan fasilitasi keciptakaryaan;
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan keciptakaryaan;
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan;
- Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;

#### c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan koordinasi mengenai perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;

- Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;

#### d. Bidang Penataan Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pada Seksi Perencanaan Penataan Ruang, Seksi Pembinaan Penataan Ruang, dan Seksi Pengawasan Penataan Ruang dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;
- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya;
- Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan bidang tata ruang;
- Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penataan ruang antar kabupaten/kota;
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang;

### 2.1.3 Struktur Organisasi

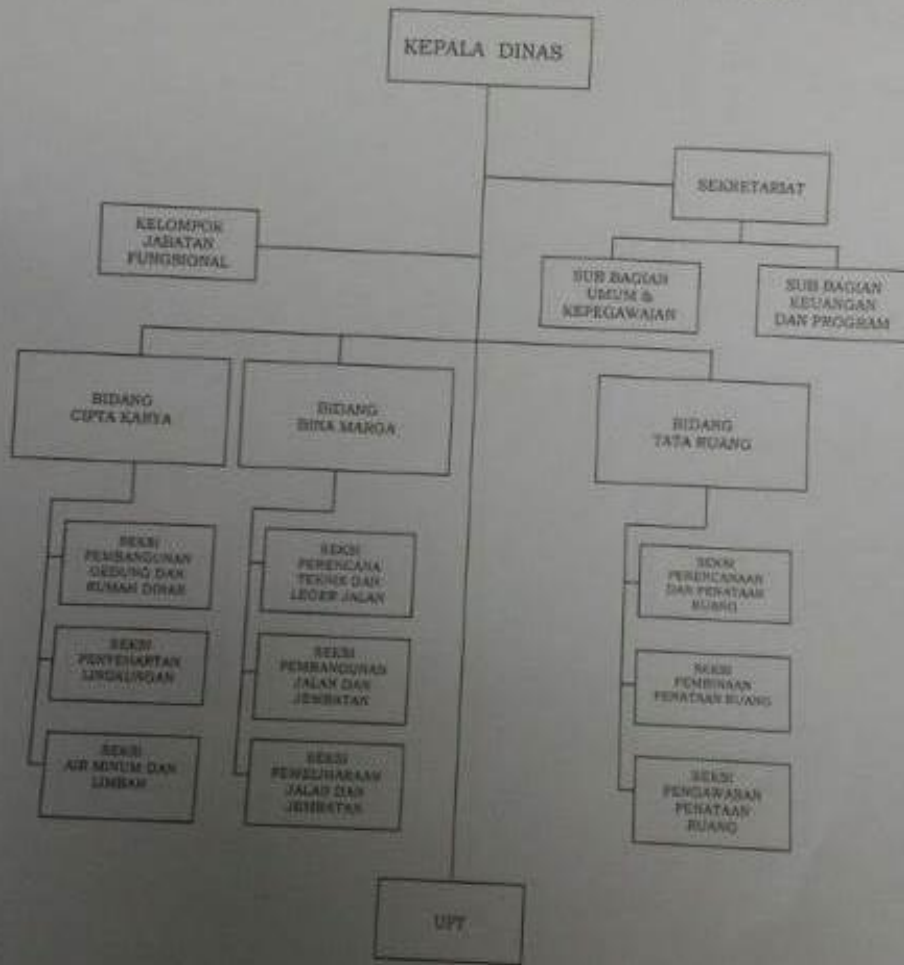
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat tersebut, dibentuk susunan organisasi Dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Cipta Karya
  - a. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - c. Seksi Air Minum dan Limbah.

4. Bidang Bina Marga:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  
5. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
  - b. Seksi Pembinaan Penataan Ruang;
  - c. Seksi Pengawasan Penataan Ruang.
  
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  
7. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Arsip paris

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR 7 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



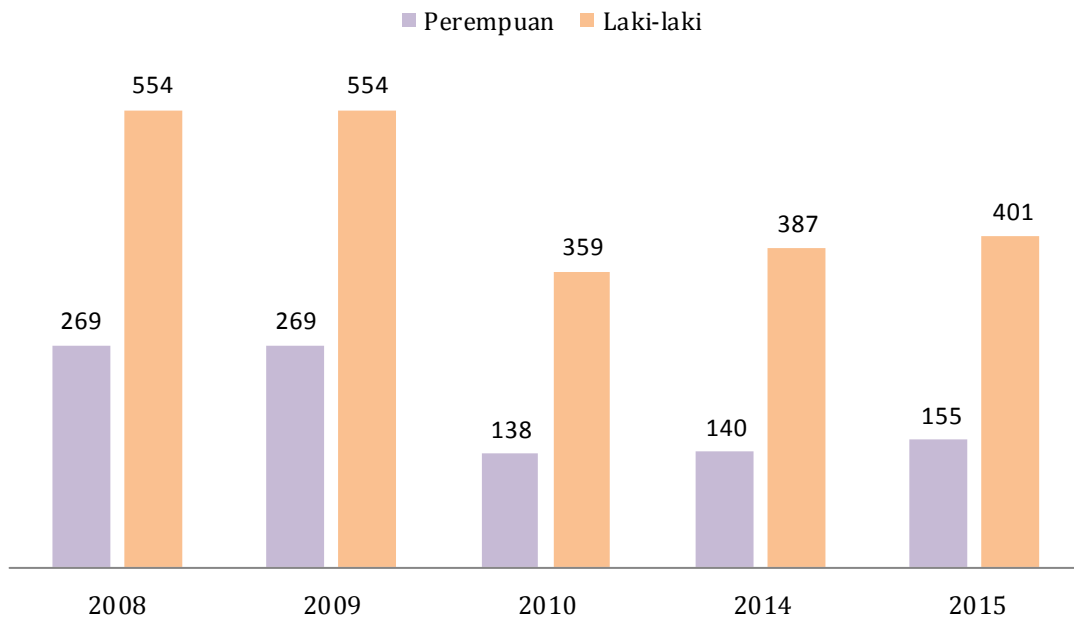
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

*[Signature]*  
 IRWAN PRAYITNO

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 496 orang.



**Gambar 2. 1**  
**Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai Pria dan Wanita**

Adapun rincian pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2. 1 Rincian Pegawai

No.	RINCIAN PEGAWAI	JUMLAH (Orang)				
		2008	2009	2010	2014	2015
<b>I.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>497</b>	<b>527</b>	<b>556</b>
1.	Pria	554	554	359	387	401
2.	Wanita	269	269	138	140	155
<b>II.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					
1.	Pasca Sarjana ( S-2 )	52	52	37	37	31
2.	Sarjana	181	181	108	136	135
	S.1 ( Teknis )	145	145	74	102	110
	S.1 ( Non Teknis )	36	36	34	34	25
3.	Sarjana Muda	100	100	30	32	39
	D.3 ( Teknis )	68	68	28	28	33
	D.3 ( Non Teknis )	32	32	2	4	6
4.	SLTA	392	392	268	268	304
5.	SLTP	61	61	34	34	17
6.	SD	37	37	20	20	9
<b>III</b>	<b>ESELON</b>					
1.	II	1	1	1	1	1
2.	III	9	9	9	10	10
3.	IV	27	27	27	30	30

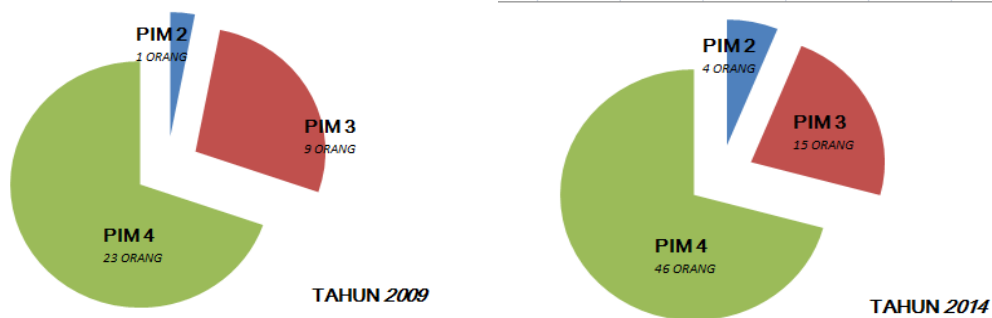
Untuk menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibutuhkan tenaga profesional yg berkompeten yg memiliki sertifikat keahlian seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 2**  
**Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2009, 2014 dan 2015**

No	Jenis Sertifikat Keahlian	Jumlah Pegawai (orang)		
		2009	2014	2015
.1	Pengadaan Barang dan Jasa	78	126	134

No	Jenis Sertifikat Keahlian	Jumlah Pegawai (orang)		
		2009	2014	2015
2.	Keahlian jalan dan jembatan	120	153	156
3.	Fungsional Teknis	135	168	177
4.	Pengujian laboratorium	0	17	25
5.	Manajemen Kebencanaan	0	48	53
6.	Pengelola Teknis Bangunan Gedung / Rumah Negara	15	21	21
7.	Brevet A dan B	42	68	74

Untuk menjadi pejabat struktural diperlukan sertifikat penjenjangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah memiliki sejumlah pegawai yang telah bersertifikat :



**Gambar 2. 2**

**Personil yang Memiliki Sertifikat Penjenjangan Karir 2009 dan 2014**

### 2.2.2 Sumber Daya Non-Aparatur

#### 1) Asset

Sumber Daya Non-Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Asset yang berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 PROVINSI : SUMATERA BARAT

## REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN ( Rp. )	AKUMULASI PENYUSUTAN ( Rp. )	NILAI BUKU ( Rp. )	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2015 ( Rp. )
				PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01		<b>GOLONGAN TANAH</b>			477.440.674.020,00	0,00	477.440.674.020,00	0,00
		01	TANAH	99	13.347.169	477.440.674.020,00	0,00	477.440.674.020,00	0,00
2	02		<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>			72.628.908.543,00	32.227.255.154,43	40.401.653.388,57	8.981.566.993,12
		02	ALAT-ALAT BESAR	-	82	37.593.913.009,00	14.794.659.019,40	22.799.253.989,60	3.584.481.375,11
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	41	8.781.966.236,00	3.857.323.611,00	4.924.642.625,00	1.027.741.625,00
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	61	162.093.380,00	118.743.948,00	43.349.432,00	18.086.094,00
		05	ALAT PERTANIAN	-	5	2.497.000,00	2.497.000,00	0,00	624.250,00
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	2.305	17.158.763.400,50	7.608.587.232,50	9.550.176.168,00	3.125.161.616,00
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	98	966.430.600,00	489.223.240,00	477.207.360,00	164.945.020,00
		09	ALAT LABORATORIUM	-	1.217	7.963.244.917,50	5.356.221.103,53	2.607.023.813,97	1.060.527.013,00
3	03		<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			159.291.394.980,00	14.161.913.117,26	145.129.481.862,74	3.169.123.579,87
		11	BANGUNAN GEDUNG	67	6.620	158.488.142.890,00	14.113.717.991,86	144.374.424.898,14	3.153.058.538,07
		12	MONUMEN	3	0	803.252.090,00	48.195.125,40	755.056.964,60	16.065.041,80
4	04		<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARIN</b>			3.101.143.999.698,71	2.601.200.511.056,95	499.943.488.641,76	47.713.152.599,83
		13	JALAN DAN JEMBATAN	-	171.439.054	3.068.490.733.166,71	2.598.244.522.291,42	470.246.210.875,29	46.639.012.536,59
		14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	-	0	31.664.719.982,00	2.906.561.438,03	28.758.158.543,97	1.049.426.399,48
		15	INSTALASI	-	0	988.546.550,00	49.427.327,50	939.119.222,50	24.713.663,75
5	05		<b>GOLONGAN ASET TETAP LAINYA</b>			741.715.470.283,74	0,00	741.715.470.283,74	0,00
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	-	4	14.441.423.945,36	0,00	14.441.423.945,36	0,00
		20	ASET TETAP RENOVASI	-	461	727.274.046.338,38	0,00	727.274.046.338,38	0,00
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>			232.533.713.082,00	0,00	232.533.713.082,00	0,00
		00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	38	20	232.533.713.082,00	0,00	232.533.713.082,00	0,00
<b>TOTAL HARGA</b>						<b>4.784.754.160.607,45</b>	<b>2.647.589.679.328,64</b>	<b>2.137.164.481.278,80</b>	<b>59.863.843.172,82</b>
<b>DIBULATKAN</b>						<b>4.784.754.160.607</b>	<b>2.647.589.679.329</b>	<b>2.137.164.481.279</b>	<b>59.863.843.173</b>

*Terbilang : Dua Triliun Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*

**Gambar 2. 3 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015**

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

Adapun kinerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman sebagai Dinas Induk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2010-2015 mengacu pada pencapaian atas indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut capaian atas indikator tersebut.

### A. Meningkatnya Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah

1. Tersedianya perencanaan tata ruang
2. Terlaksananya pembinaan penataan ruang
3. Terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang
4. Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan rawan bencana
5. Terlaksananya review RTRW Provinsi Sumatera Barat
6. Terlaksananya revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat
7. Terlaksananya Penyusunan RTR kawasan Strategis Provinsi (KSP)
8. Terlaksananya proses legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
9. Terlaksananya kampanye publik penataan ruang melalui media massa
10. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan bidang penataan ruang
11. Terlaksananya pendampingan revisi RTRW kabupaten/kota
12. Terlaksananya pendampingan legalisasi RDTR
13. Terlaksananya monitoring tata ruang Provinsi Sumatera Barat
14. Terlaksananya Pengawasan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat

### B. Meningkatnya Kemantapan Jalan

1. Prosentase jalan propinsi dalam kondisi mantap adalah tercapainya target peningkatan kemantapan jalan propinsi sebesar 10% dari kondisi tahun 2010 sebesar 65,93% menjadi 91,13 % pada tahun 2015.
2. Prosentase jalan nasional dalam kondisi mantap adalah tercapainya target peningkatan kemantapan jalan nasional sebesar 7% dari kondisi tahun 2010 sebesar 88% menjadi 95% pada tahun 2015.

- 3 Prosentase bertambahnya jalan baru sebesar 17% dibandingkan dengan total panjang jalan propinsi dengan total panjang 1230 km. Jalan baru adalah pembukaan jalan-jalan baru atau pembangunan / peningkatan jalan yang dikerjakan pada jaringan jalan strategis propinsi maupun jaringan jalan strategis nasional.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 S/D 2015  
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Indikator Out Come	Satuan	Target		Indikator Out Put	Satuan	Total Target	Rencana Target					Realisasi					Total Realisasi 2015	Ket	
			2010	2015				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	65,9	89,5	a1	Panjang jalan yang di tingkatkan	KM	142	25	38	29	26	24	25	38	29	26	47,986	165,986	
					a2	Panjang Jalan yang di rehab	KM	5.373	1.035	1.027	1.025	1.143	1.143	1.035	1.027	1.025	1.143	1.143	5.373	
					a3	Panjang jembatan yang ditingkatkan	M	355	-	165	9	16	165	-	165	9	16	30	220	
					a4	Panjang jembatan yang direhab	M	848	134	203	192	174	145	134	203	192	174	146	849	
					a.5	Panjang Jalan Yang di bangun	KM	177	18	36	31	65	27	18	36	31	65	14,303	164,303	
					a6	Panjang jembatan yang di bangun	M	1.853	273	425	251	679	225	273	425	251	679	60	1.688	



### KONDISI JALAN PROVINSI DI SUMATERA BARAT ( Status Bulan Desember 2015 )

JALAN & JEMBATAN	KONDISI	TAHUN											
		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'	(%)	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)
JALAN PROVINSI	MANTAP	996,77	83,78	966,77	83,78	1.016,49	88,09	886,90	87,77	1.085,32	88,20	1.121,41	91,13
	TDK MANTAP	187,17	16,22	187,17	16,22	137,45	11,91	123,60	12,23	145,21	11,80	109,12	8,67
	TOTAL Pj(Km)	1153,94	100,00	1.153,94	100,00	1.153,94	100,00	1.010,50	100,00	1.230,53	100,00	1.230,53	100,00
JEMBATAN		6.621,91	89,43	6.630,69	90,87	6.596,20	90,40	6.514,94	90,33	6.574,19	91,15	6.582,13	91,26
	MANTAP	674,80	10,57	666,06	9,13	700,55	9,60	697,56	9,67	638,31	8,85	630,37	8,74
	TDK MANTAP	7.296,75	100,00	7.296,75	100,00	7.296,75	100,00	7.212,50	100,00	7.212,50	100	7.212,50	100,00
	TOTAL Pj (M)												

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.  
KONDISI JALAN NASIONAL DI SUMATERA BARAT  
( Status Bulan Desember 2015 )**

JALAN	KONDISI	TAHUN											
		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'	(%)	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)
JALAN NASIONAL	MANTAP	619,47	51,07	1.094,93	90,27	1.119,83	92,38	1.119,83	92,38	1.170,98	96,54	1.224,09	84,49
	TDK MANTAP	593,42	48,93	117,97	9,73	93,06	7,62	93,06	7,62	41,90	3,46	224,72	15,51
	TOTAL Pj(Km)	1.212,89	100,00	1.212,89	100,00	1.212,89	100,00	1.212,89	100,00	1.212,89	100,00	1.448,81	100

### C. Meningkatnya Penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara

Pembangunan gedung negara sebanyak 27 unit selama rentang waktu 2010 – 2015, sehingga target jumlah gedung negara yang terbangun pada akhir tahun 2015 : 57%.

### D. Meningkatnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman yang Berbasis Kawasan Layak Huni.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
Meningkatnya penyediaan Perumahan dan Permukiman yang berbasis Kawasan Layak Huni	Persentase Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman	74,11	74,05	99,91

Definisi Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Perumahan adalah Kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Gambaran pencapaian Pelayanan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman**  
**Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Peraturan Daerah RTRW	2	9	8	-	1	2	9	8	-	1	1,0	1,0	1,0		1,0
2	Dokumen RTR kawasan strategis	2	5	0	-	0	2	5	-	-	0	1,0	1,0	-		
3	Dokumen RDTR dan Zoning Regulation	2	0	2	0	1	2	-	2	0	1	1,0	-	1,0		1,0
4	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	1	0	5	7	9	1	-	5	7	9	1,0	-	1,0	1,0	1,0
5	Panjang jalan yang di bangun	25	38	29	26	24	25	38	29	26	24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Panjang Jalan yang di rehab	1035	1027	1025	1143	1143	1.035	1.027	1.025	1143	1143	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Panjang jembatan yang dibangun	0	165	9	16	165	-	165	9	16	165		1,0	1,0	1,0	1,0
8	Panjang jembatan yang direhab	134	203	192	174	145	134	203	192	174	145	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Jumlah bangunan gedung negara yang di bangun	2	4	1	1	12	2	4	1	1	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
14	Jumlah bangunan gedung negara yang di rehab/retrofit	1	4	0	2	0	1	4	-	2	0	1,0	1,0	-	1,0	
15	Jumlah rumah negara yang terbangun	0	0	0	3	7	-	-	-	3	7		-	-	1,0	1,0
16	Jumlah rumah negara yang di rehab	0	1	0	1	2	-	1	-	1	2		1,0	-	1,0	1,0
17	Pembangunan Rumah Layak Huni	0	0	1795	1180	525	-	-	1.795	1180	525		-	1,0	1,0	1,0
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman (APBN)	16	11	14	11	10	16	11	14	11	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	Penataan Revitalisasi kawasan tradisional / sejarah, RTH	6	5	2	0	5	6	5	2	0	5	1,0	1,0	1,0		1,0
20	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	5000 0	5000 0	5000 0	6000 0	7572 3	50.000	50.000	50.000	6000 0	75723	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) skala kota yang di bangun	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1,0	1,0	-		
22	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) skala kawasan yang di bangun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) setempat/komunal yang di bangun (sanimas, SLBM)	4	4	8	-	18	4	4	8	-	18	1,0	1,0	1,0		1,0

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
24	Luasan Daerah Genangan yang ditanggulangi dengan sistem drainase primer	3	2	2	1	0	3	2	2	1	0	1,0	1,0	1,0	1,0	
25	Pembangunan TPA Regional	2	0	0	0	0	2	-	-	0	0	1,0	-	-		
26	Pembangunan TPA Lokal		2	1	3	3		2	1	3	3		1,0	1,0	1,0	1,0
27	Pembangunan sarana pengolahan sampah 3 R	7	9	13	-	3	7	9	13	-	3	1,0	1,0	1,0		1,0



Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Prasjal Tarkim Prov. Sumatera Barat Tahun 2010-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program pelayanan administrasi perkantoran	1.760,45	2.322	2.843	3.684	4.140	4.207	1.380,51	2.198	2.535	3.071	3.888	4.025	0,78	0,95	0,89	0,83	0,94	0,96	20%	25%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	495,30	1.937	2.488	3.365	4.807	3.147	492,12	1.886	2.381	3.284	4.645	3.009	0,99	0,97	0,96	0,98	0,97	0,96	73%	71%
Program peningkatan disiplin aparatur	245,00	265	266	218	201	269	219,80	261	215	212	198	268	0,90	0,99	0,81	0,97	0,98	1,00	3%	6%
Program fasilitasi purna tugas pns			663						663						1,00				0%	0%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70,05	145	542	500	205	230	40,21	142	537	469	201	216	0,57	0,98	0,99	0,94	0,98	0,94	65%	94%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	652,78	754	1.214	1.870	1.875	1.558	642,95	747	1.198	1.778	1.649	1.516	0,98	0,99	0,99	0,95	0,88	0,97	23%	22%
Program pembangunan sarana	18.836,54						17.289,77						0,92						0%	0%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
pendidikan																				
Program pembangunan jalan dan jembatan propinsi & starategis provinsi	204.896,34	209.441	264.833	244.816	327.932	305.555	201.090,65	194.113	257.494	241.937	319.610	287.212	0,98	0,93	0,97	0,99	0,97	0,94	10%	9%
Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	28.771,44	28.771	45.875	52.578	54.920	64.329	28.740,08	27.153	45.827	52.550	54.626	60.190	1,00	0,94	1,00	1,00	0,99	0,94	19%	18%
Program peningkatan sarana dan prasarana ke pu-an			1.338	1.800	2.305	2.830			1.331	1.793	2.244	2.823			0,99	1,00	0,97	1,00	28%	29%
Program pengembangan sistem pengelolaan air minum dan air limbah	4.628,01	20.905	20.163	17.043	16.171	3.726	4.516,09	19.103	18.817	16.503	16.150	3.698	0,98	0,91	0,93	0,97	1,00	0,99	50%	46%
Program penataan bangunan dan lingkungan	52.402,54	53.790	62.806	47.580	53.376	117.737	32.697,91	50.404	56.192	44.650	34.564	112.526	0,62	0,94	0,89	0,94	0,65	0,96	26%	50%
Program bimbingan teknis peningkatan jasa konstruksi	352,15	691	1.076	3.600	3.328	1.761	304,12	586	959	3.492	2.921	1.691	0,86	0,85	0,89	0,97	0,05	0,96	66%	72%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program peningkatan kerja pengelolaan persampahan dan drainase	1.293,72	3.145	5.393	3.896	5.915	5.685	1.049,45	2.561	4.244	2.933	5.262	4.475	0,81	0,81	0,79	0,75	0,89	0,79	47%	49%
Program percepatan sanitasi permukiman (ppsp)						200						50						0,25	0%	0%
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	12.898,45	1.162	24.759	620			12.221	880	20.250	524			0,95	0,76	0,82	0,85			614%	670%
Program pengembangan perumahan	394,82	1.065	1.468	1.100	1.659	1.197	359,0	1.026	1.355	964	1.620	1.011	0,91	0,96	0,92	0,88	0,98	0,84	41%	44%
Program pemberdayaan komunitas perumahan			11.560	14.390	13.609	4.494			11.035	14.177	12.413	4.444			0,95	0,99	0,91	0,99	-16%	-16%
Program perencanaan penataan ruang	509,66	1.526	3.307	2.772	1.986	4.610	464,06	1.523	3.132	2.715	1.944	4.587	0,91	1,00	0,95	0,98	0,98	0,99	81%	86%
Program pengaturan dan pengawasan penataan ruang					369	361						363	358					0,98	-2%	-2%
Program pembinaan penataan ruang				625	991	385				603	925	374				0,96	0,93	0,97	-1%	-3%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program pengendalian pemanfaatan ruang	192,91	1.222	306				189,51	1.168	258				0,98	0,96	0,84				229%	219%
Program pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam ( bnpb )	225.987,32						201.125						0,89						0%	0%
Urusan otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		300	275	400	203,375	220		281	266	375	153	211		0,94	0,97	0,94	0,75	0,96	-1%	4%

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam menyusun strategi digunakan analisis dengan melihat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

### 2.4.1. Kekuatan (Strenght)

Berdasarkan SK Gubernur Sumbar. No: 600-903.1-2015 Tgl 18 Desember 2015, total panjang ruas jalan provinsi adal 1525 km yang terbagi sebagai berikut :

**Tabel Ruas Jalan Provinsi  
Berdasarkan SK Gubernur Sumbar. No: 600-903.1-2015  
Tgl 18 Desember 2015**

NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON / TANAH	BELUM TEMBUS
1	007		Simancung - Tj. Ampalu	11,08	11,08		
2	008		Tj. Ampalu - Sijunjung	20,00	20,00		
3	010		Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29,00	29,00		
4	011		Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	11,90	11,90		
5	012		Simp. Koto Baru - Junction	5,40	5,40		
6	018		Indera Pura - Muara Sakai	7,30	7,30		
7	025		Manggopoh - Padang Luar	69,43	69,43		
8	028		Sicincin - Kurai Taji	16,44	16,44		
9	031		Panti - Simpang Empat	74,23	74,23		
10	033		Simpang Empat - Sasak	20,00	20,00		
11	034	2	Air Balam - Air Bangis	12,60	12,60		
12	035		Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,50	18,50		
13	036		Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,79	28,79		

NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON / TANAH	BELUM TEMBUS
14	037		Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10,40	10,40		
15	038		Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30,60	30,60		
16	039		Guguk Cino - Sitangkai	15,12	15,12		
17	040		Sitangkai - Tj. Ampalu	17,28	17,28		
18	044		Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	50,61	50,61		
19	054		Junction - Abai siat	12,60	12,60		
20	055		Sijunjung - Tanah Badantung	4,40	4,40		
21	056	1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20,00	20,00		
22	056	2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17,00	17,00		
23	056	3	Abai Sangir - Sei. Dareh	74,00	14,53	59,48	
24	068		Padang Sawah - Kumpulan	36,50	36,50		
25	069	2	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	46,85	46,85		
26	070		Batusangkar - Ombilin	18,51	18,51		
27	071		Solok - Alahan Panjang	47,80	47,80		
28	072		Lubuk Basung - Sungai Limau	30,90	30,90		
29	073		Pasar Baru - Alahan Panjang	49,40	23,84	25,56	
30	075		Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	20,50	20,50		
31	076		Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73,95	58,95	15,00	
32	078		Simpang Koto Mambang - Balingka	39,40	39,40		
33	079		Simpang Baso - Piladang	11,14	11,14		
34	080		Matur - Palembang	20,70	20,70		
35	081		Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	13,30	13,30		
36	082		Alahan Panjang - Kiliran Jao	72,90	17,05	25,83	30,03
37	083		Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,10	1,31	30,19	12,60
38	084		Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	14,17	14,17		

NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON / TANAH	BELUM TEMBUS
39	085		Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo ( TPA Regional )	2,05	2,05		
40	086		Surantih - Kayu Aro - Langgai	27,70	4,50	13,20	10,00
41	087		Duku - Sicincin	28,65	0,00	18,65	10,00
42	088		Padang Koto Gadang - Palembang	31,00	31,00		
43	089		Jl. Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok	9,70	9,70		
44	090		Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi	25,00	13,00	12,00	
45	091		Simpang Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	23,00	5,00	18,00	
46	092		Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	28,40	28,40		
47	093		Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting	30,00	27,00	3,00	
48	094		Pintu Angin - Labuah Saiyo	5,50	3,00	2,50	
49	095		Rao - Rokan (Batas Riau)	33,00	33,00		
50	096		Lubuk Sikaping - Talu	28,00	7,00	21,00	
51	097		Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43,20	2,50	40,70	
52	098		Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,00	3,00	8,80	0,20
53	099		Purus - Bandara International Minangkabau	16,00			16,00
54	100		Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1,20	1,20		
55	101		Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47,00	3,00	38,00	6,00
56	102		Rawang - Talawi	6,00	6,00		
57	103		Simp. SP II - Kantor Camat	5,10		5,10	
58	104		Kantor Camat - Berkat	5,90		5,90	
TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI				<b>1525,20</b>	1097,5	342,90	84,83

Sementara itu, selain dilakukan peningkatan dan pembangunan, setiap tahunnya juga dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin atas

ruas jalan provinsi yang ada. Adapun ruas jalan provinsi yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan adalah sepanjang 1117 km.

- Telah tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat serta dokumen perencanaan lainnya sebagai acuan makro perencanaan pembangunan terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur.
- Sumatera Barat memiliki potensi sumber air minum yang baik, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan air minum dan bersih di masyarakat.
- Untuk meningkatkan mutu konstruksi dan lingkungan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah tersedia laboratorium konstruksi dan lingkungan yang telah terakreditasi nasional.
- Tersedianya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi.

#### 2.4.2. Kelemahan (Weakness)

- Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan, Demikian pula jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, seperti kawasan strategis, kawasan wisata, kawasan industri, pelabuhan laut (outlet) dan pelabuhan udara serta pasar-pasar tumpah yang masih mengalami kemacetan.
- Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil pada Jalan provinsi.
- Masih adanya sejumlah bangunan pemerintahan yang belum selesai dibangun pasca gempa September 2009
- Adanya kendala dalam pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.
- Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat ( *Sistem Sewerage* )



### 2.4.3. Peluang (Opportunity)

- Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan wilayah yang cerdas dan dimanifestasikan dalam pengembangan smart village, smart city, serta koridor super yang dapat menciptakan manfaat sosial yang tinggi bagi masyarakat.
- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan.
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa
- Tersedianya kesempatan tugas belajar untuk meningkatkan pendidikan formal.

### 2.4.4. Ancaman (Threats)

- Pertumbuhan penduduk Sumatera Barat, yang berdasarkan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,34%. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ini berimplikasi pada kebutuhan akan pelayanan publik terutama di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kementerian PUPera, bahwa peningkatan jumlah penduduk juga secara tidak berdampak pada eksploitasi sumberdaya alam sehingga dibutuhkan perencanaan tata ruang yang dapat mendukung daya tampung lingkungan dan berkelanjutan.
- Letak geografis Sumatera Barat berada pada daerah tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Euroasia dengan topografi berbukit, bergunung dengan kelerengan di atas 10 % dan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebahagian besar wilayah Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan dan bencana lainnya.

- Belum meratanya aksesibilitas pelayanan jaringan jalan antara bagian utara dan selatan di provinsi Sumatera Barat dan jalan menuju provinsi tetangga.
- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;

# BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan dalam Pengelolaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Internal :

- a. Terbatasnya sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terutama tenaga teknis.
- b. Keterbatasan data dan informasi terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain baik secara vertikal dengan Kementerian Pusat/pemerintah daerah, maupun secara horizontal dengan OPD lain di Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan infrastuktur di Sumatera Barat.

Eksternal :

- a. Belum sinerginya penanganan antara jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten/Kota karena adanya pemisahan tegas dalam Undang Undang Jalan yang menyebabkan terkotak-kotaknya program penanganan jalan.
- b. Belum terpenuhinya persyaratan minimum untuk lebar dan kualitas struktur jalan berkaitan dengan volume serta beban muatan gandar yang melewati standar
- c. Banyaknya lokasi rawan longsor, amblas, banjir.
- d. Besarnya biaya penanganan jalan akibat topografi yang berada di daerah perbukitan/pegunungan.
- e. Masih adanya bangunan gedung pemerintah yang harus dibangun kembali atau direnovasi pasca gempa 30 September 2009
- f. Belum sinerginya pembangunan SPAM regional baik kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- g. Rendahnya pelayanan air limbah regional.
- h. Kurangnya komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang.
- i. Lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan penataan ruang sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
- j. Lemahnya fungsi koordinasi penataan ruang
- k. Belum tersedianya Standar, Pedoman dan Manual (SPM) Bidang Penataan Ruang

### **3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Gubernur**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat.

### 3.2.1 Visi

Visi Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 merupakan visi kepala daerah terpilih yang merupakan kondisi objektif yang akan diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang.

**VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :**

## **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA**

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. *Meningkatkan tata kehidupan yang yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";*
2. *Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;*
3. *Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;*
4. *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadi Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat;*
5. *Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Misi ke 5 **Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mengejawatahkan visi pembangunan sumbar tahun 2016 - 2021 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan.

Sesuai dengan misi 5 tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik
- Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan

### **3.2.2 Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Prov. Sumatera Barat**

Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
7. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan
8. Penurunan Tingkat kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal
9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

### 3.2.3 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Terpilih

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian Visi, Misi Gubernur sangat erat. Sesuai dengan Misi Gubernur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ikut berperan terhadap pencapaian Misi ke -5 yaitu **Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**, meskipun secara tidak langsung juga berperan terhadap pencapaian misi lainnya seperti pada Misi ke 4 yaitu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, Berdaya Saing Regional dan Global, dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Daerah. Pada Misi ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi turut berperan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata serta dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

**Tabel 3. 1**  
**Hubungan Antara Visi, Misi ke 4, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur**  
**dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
<b>MISI 5 :</b>										
<b>Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>										
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</b>										
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi</li> <li>Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi</li> <li>Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi</li> <li>Pembangunan jalan dan jembatan untuk</li> </ol>	Kamantapan jalan provinsi (%)	%	69	75	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi</li> <li>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi</li> <li>Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan</li> </ol>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR



NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah 4. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)					4. Peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi 5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
2	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan. Lingkungan dan bangunan gedung	1. Menyelenggarakan pembangunan dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi 2. Membenahi infrastruktur dasar regional 3. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/peruma	Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah bangunan gedung pemerintah terbangun	unit	12	25	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
				Jumlah bangunan strategis terbangun	unit	0	13			
				Jumlah rumah negara terbangun	unit	6	15			

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		han dan lingkungan		Tempat evakuasi sementara	unit	4	10			
				Persentase rumah tangga bersanitasi	%	72	77	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		
			Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional dan drainase	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	68	74	Pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) lintas daerah kab/kota		
				Panjang drainase terbangun	km	0	20	Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi		
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan</b>										

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW 2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku	1. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang 2. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi 3. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistem perkotaan	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79	86	1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
4	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan terhadap RTRW		4. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang							

Tabel 3. 2

**Hubungan Antara Visi, Misi ke 5, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera
MISI 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi</li> <li>2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi</li> <li>2. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi</li> <li>3. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah</li> <li>4. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)</li> </ol>
	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan. Lingkungan dan bangunan gedung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pembangunan dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi</li> <li>2. Membenahi infrastruktur dasar regional</li> <li>3. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan</li> <li>2. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional dan drainase</li> </ol>
Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang</li> <li>2. Meningkatkan kepatuhan pemangku kepentingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW</li> <li>2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang</li> <li>2. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi</li> </ol>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
tampung lingkungan	terhadap RTRW	pembangunan dan aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistem perkotaan</li><li>4. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang</li></ol>

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa visi Kementerian PUPR adalah :

*Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian PUPR memiliki 5 visi, dimana 3 diantaranya terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Yaitu :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- c. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

### 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR adalah

memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan unntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan tujuan itu, rumusan sasaran strategis Kementerian ATR yang terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- a. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- b. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)

Penyelenggaraan pentaaan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Penataan Ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, rencana Detail Tata Ruang, fasilitasi dpenyediaan peta skala 1:5000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

### **3.5 Keterkaitan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumatera Barat dengan Visi dan Misi Kementerian PUPR dan Kementerian ATR**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan UPTD ;sementara tupoksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang di turunkan pada tupoksi Bidang Tata Ruang.

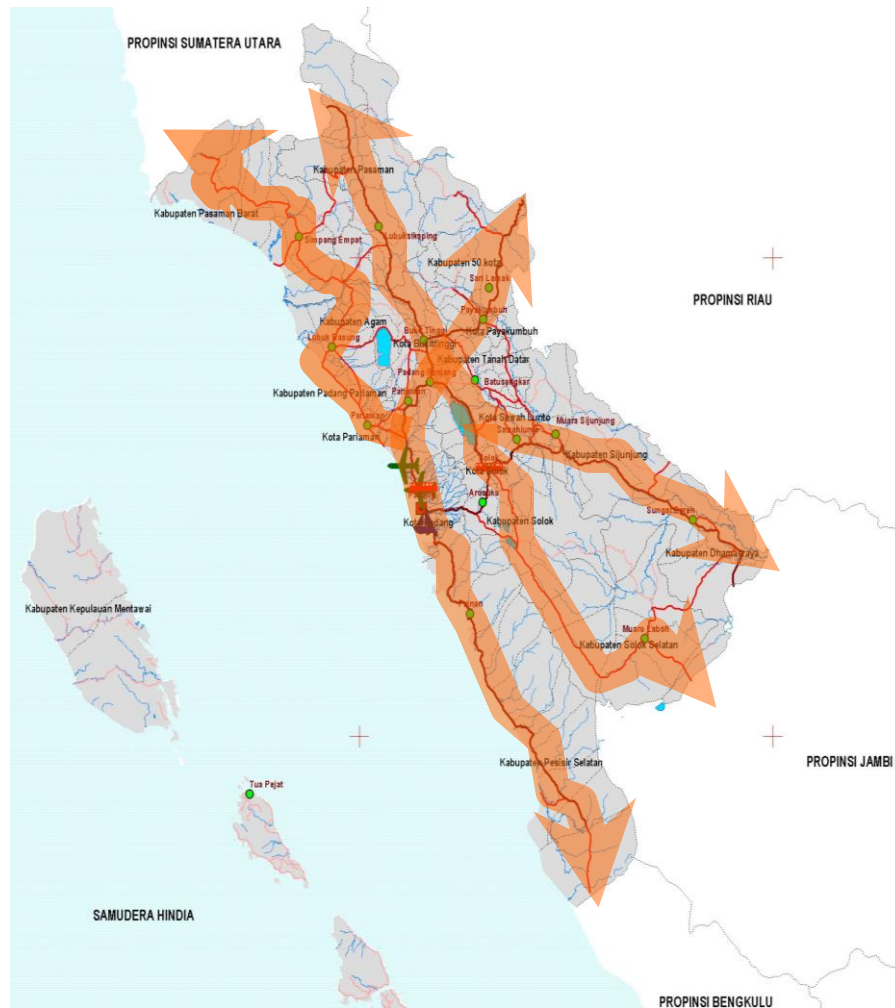
### 3.6 Telaahan RTRW Provinsi Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa pengembangan prasarana wilayah dengan dukungan infrastuktur dilakukan dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan, dengan pola rang sebagai berikut :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan
6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah

Hubungan antara Kabupaten Kota dibentuk dengan sistem jaringan jalan antara Provinsi (Jalan Nasional) dan antara Kabupaten/Kota (Jalan Provinsi) serta di lingkungan Kabupaten/Kota itu sendiri (Jalan Kabupaten/Kota) Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi telah terhubung dengan 18 Ibu Kota Kabupaten/Kota.



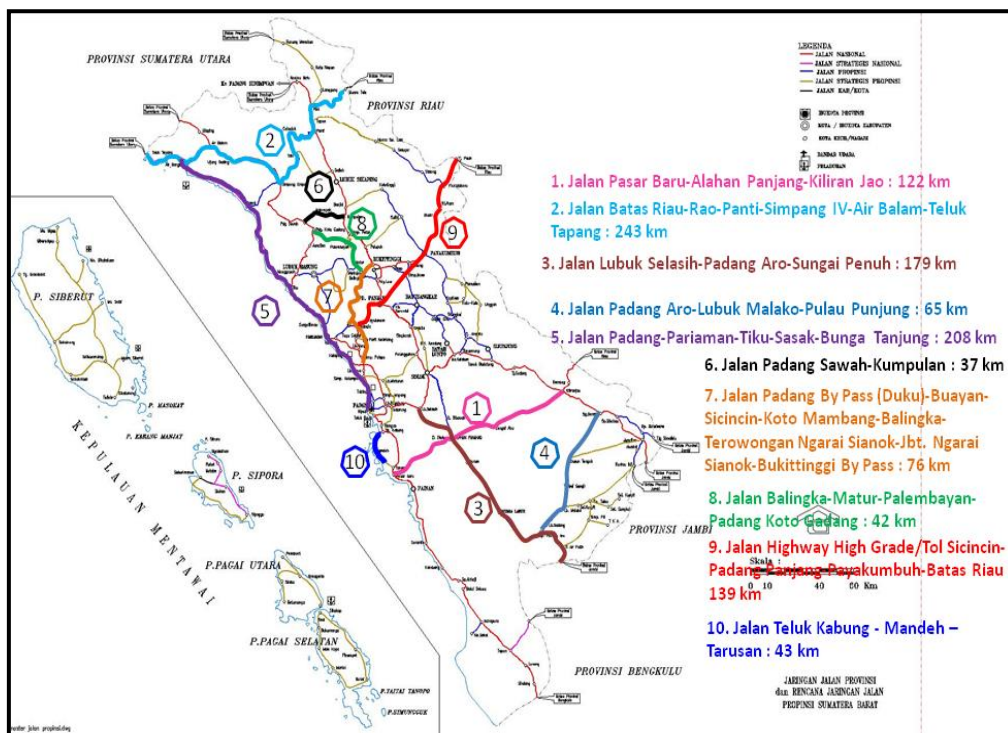


**Gambar 3. 1** Peta Gagasan Pembentukan Struktur Ruang

Pembentukan Struktur Ruang didasari atas pola jaringan jalan yang telah ada, maka untuk pengembangan prasarana wilayah perlu dibangun/ditingkatkan dan beberapa ruas jalan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dairi: Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao.
2. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Batas Riau: Ruas Jalan Batas Riau-Panti-Simpang Empat-Air Balam-Teluk Tapang.

3. Peningkatan Daya Dukung Jalan dari Kabupaten Solok menuju Kabupaten Solok Selatan dan Perbatasan Provinsi Jambi: Ruas Jalan Lubuk Selasih-Padang Aro-Sungai Penuh.
4. Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya : Ruas Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung.
5. Perkuatan sistem jaringan jalan Kota Padang-Pariaman-Tiku-Sasak-Bunga Tanjung.
6. Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan
7. Penambahan kapasitas jaringan jalan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi: Ruas Padang By Pass-Buayan-Sicincin-Koto Mambang-Balingka-Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok-Bukittinggi By Pass.
8. Penambahan Kapasitas Jalan Balingka-Matur-Palembayan-Padang Koto Gadang Kabupaten Agam.
9. Peningkatan kapasitas jalan mendukung pola pengembangan perdagangan dan pertanian, dan perkebunan : Ruas Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau termasuk penyelesaian Jembatan Kelok 9.
10. Pembangunan Jalan antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan : Ruas Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan.



Gambar 3. 2 Peta Pembangunan/Peningkatan Jalan Strategis

### 3.7 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dilakukan berdasarkan faktor-faktor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD; serta disesuaikan dengan cita-cota dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Berdasarkan faktor tersebut diatas, dilakukan skoring terhadap isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan :

- a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra OPD; K/L; serta pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD
- b. Merupakan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD
- c. Berdampak besar pada publik
- d. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- e. Kemudahan untuk menangani
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, ada beberapa isu strategis dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai berikut :

- Persentase kemandapan jalan provinsi yang turun menjadi 68% pada Tahun 2015 sebagai akibat penambahan ruas jalan Provinsi sesuai SK Jalan Tahun 2015. Persentase ini jauh dibawah persentase kemandapan jalan nasional yaitu sebesar 86% pada Tahun 2015.
- Belum selesainya proses rekonstruksi dan pembangunan sejumlah gedung pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beberapa bangunan strategis, rumah negara dan tempat evakuasi sementara (shelter). Perkembangan teknologi bangunan yang semakin maju memungkinkan

penerapan bangunan ramah gempa sebagai bentuk antisipasi atas ancaman gempa bumi.

- Sebagaimana menjadi target dalam universal access, target capaian nasional untuk air minum dan rumah tangga bersanitasi masing-masing adalah 100%. Wilayah Sumatera Barat sendiri secara umum baru dapat mengakses layanan air minum sebesar 68% dan rumah tangga bersanitasi sebesar 66,84% (Tahun 2015). Keteringgalan pelayanan ini juga diperburuk dengan pertumbuhan penduduk yang jauh melebihi pertumbuhan ketersediaan sarana prasarana, terutama air minum dan sanitasi.
- Seiring dengan perkembangan pembangunan di Sumatera Barat serta adanya program Nawacita mengakibatkan terjadinya dinamika pembangunan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat yang tidak terakomodir di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota.

# BAB IV

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1 Visi - Misi

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu :

#### ***Mewujudkan Infrastruktur yang handal guna memacu daya saing ekonomi kerakyatan skala besar***

Infratsruktur yang **andal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang bermutu, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya koneksinya antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air bersih yang baik, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang dapat dijadikan efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang baik dan berwawasan lingkungan, tanggap terhadap pemeliharaan dan pelayanan jalan, guna memacu struktur ekonomi yang tangguh.
2. Mendorong terciptanya penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan.
3. Melaksanakan pelayanan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Menciptakan penataan ruang yang berkelanjutan guna pengembangan wilayah.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran**

### **4.2.1. Tujuan**

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera memiliki 2 (dua tujuan) yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah
- b) Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### 4.2.2. Sasaran

a) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

b) Meningkatkan prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, lingkungan, dan bangunan gedung.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu ditunjang dengan peningkatan prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan yaitu pelayanan air minum, air limbah, dan drainase. Selain itu, tersedianya Bangunan Gedung dan Rumah Negara menjadi sasaran dalam mencapai tujuan pelayanan masyarakat yang prima dalam bidang sarana dan infrastruktur termasuk dalam menopang kesiap-siagaan Sumatera Barat sebagai daerah yang rawan akan bencana alam melalui pembangunan shelter (tempat evakuasi sementara) ttunami.

c) Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang

Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	Jumlah bangunan gedung pemerintah terbangun	17 gedung	17 gedung	21 gedung	23 gedung	25 gedung	25 gedung
			Jumlah bangunan strategis terbangun	4 unit	5 unit	6 unit	13 unit	13 unit	13 unit
			Jumlah rumah negara terbangun	10 unit	12 unit	14 unit	15 unit	15 unit	15 unit
			Tempat evakuasi sementara (shelter)	6 unit	6 unit	6 unit	8 unit	9 unit	10 unit
			Peningkatan cakupan layanan air minum	69%	70%	71%	72%	73%	74%
			Peningkatan rumah tangga bersanitasi	72%	73%	74%	75%	76%	77%
			Panjang Drainase Terbangun	0 km	0 km	5 km	5 km	5 km	5 km



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	80%	81%	82%	83%	84%	86%

### 4.3 Strategi Dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

#### **Sasaran 1 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah**

- Strategi : Melaksanakan penyelenggaraan jalan provinsi yang berkualitas dan terpadu
- Kebijakan : – Melakukan pembangunan/peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi prioritas

#### **Sasaran 2 Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara**

- Strategi : Meningkatkan kualitas dan penyediaan Gedung dan Rumah Negara
- Kebijakan : – Melaksanakan pembangunan gedung pemerintah, bangunan strategis, rumah negara, tempat evakuasi sementara (shelter), serta dokumen kelengkapan pembangunan gedung negara dan rumah negara.

#### **Sasaran 3 Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman / perumahan, bangunan dan lingkungan**

Sektor	Strategi	Kebijakan
Air Minum	Meningkatkan pembangunan/peningkatan dan pengelolaan infrastruktur penyedia air minum	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan SPAM regional pada kawasan-kawasan strategis
Air Limbah	Meningkatkan pembangunan/peningkatan dan pengelolaan infrastruktur penyedia air limbah	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Air Limbah regional pada kawasan-kawasan strategis

**Sasaran 4 Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman**

- Strategi : Membangun prasarana drainase yang terpadu  
 Kebijakan : Mengembangkan drainase pada jalan provinsi

**Sasaran 5 Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang**

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang
	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku	Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistem perkotaan
Melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan bidang penataan ruang kepada stakeholder	Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang

**Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2016-2021**

<b>Visi</b>	<i>Mewujudkan Infrastruktur yang handal guna memacu daya saing ekonomi kerakyatan skala besar</i>
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang baik dan berwawasan lingkungan, tanggap terhadap pemeliharaan dan pelayanan jalan, guna memacu struktur ekonomi yang tangguh.</li> <li>2. Mendorong terciptanya penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan.</li> <li>3. Melaksanakan pelayanan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat</li> <li>4. Menciptakan penataan ruang yang berkelanjutan guna pengembangan wilayah.</li> </ol>

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi	Melakukan pembangunan/peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi prioritas
			Melakukan peningkatan SDM pengelola jalan provinsi
	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan.	Meningkatkan kualitas dan penyediaan Gedung dan Rumah Negara	Melaksanakan pembangunan gedung pemerintah, bangunan strategis, rumah negara, tempat evakuasi sementara (shelter), serta dokumen kelengkapan pembangunan gedung negara dan rumah negara.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Lingkungan dan bangunan gedung		Melakukan peningkatan SDM pengelola Gedung Negara dan Rumah Negara
		Meningkatkan pembangunan/peningkatan dan pengelolaan infrastruktur penyedia air minum	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan SPAM regional pada kawasan-kawasan strategis
		Meningkatkan pembangunan/peningkatan dan pengelolaan infrastruktur penyedia air limbah	Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional dan drainase
Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang
			Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
		Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku	Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistem perkotaan
			Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang

# BAB V

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2016 - 2021 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan sebagai berikut:

### 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang disusun terdiri dari :

- a. Melanjutkan Kegiatan-Kegiatan yang belum selesai pada RPJMD tahun 2010 - 2015
- b. Menyusun Program dan Kegiatan baru RPJMD tahun 2016 - 2021

Uraian sebagai berikut :

#### 1. Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi, dengan kegiatan :

- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok

- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab.Dharmasraya
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Sawahlunto
- Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah-I
- Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah II
- Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah III
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Solok Selatan
- Peningkatan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Kep. Mentawai
- Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi
- Penyusunan Database dan Survey Jalan dan Jembatan Provinsi
- Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi
  - Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat
- Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi
- Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum
- Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis
- Pengadaan lahan untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi
- Survey Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam

## **2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, dengan kegiatan :**

- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Pasaman
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat

- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Bukittinggi dan Agam Timur
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Agam
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Solok dan Kota Solok
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Solok Selatan
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pesisir Selatan dan Keb. Kepulauan Mentawai
- Pemeliharaan Khusus Jalan Propinsi Rute Tour de Singkarak
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan
- Penanganan Kondisi Kritis Jalan dan Jembatan Provinsi
- Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan
- Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pembinaan dan koordinasi kegiatan Bidang Peralatan dan bahan Jalan Provinsi Sumatera Barat
- Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I
- Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah II

### **3. Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan, dengan kegiatan:**

- Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium ke Binamargaan
- Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium ke Binamargaan



- Monitoring Pengendalian Mutu UPTD

**4. Peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi, dengan kegiatan :**

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi
- Kegiatan Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi
- Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi
- Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
- Penyusunan Ranperda SMK3
- Penyusunan Perda SMM dan SMK 3
- Profil Jasa Konstruksi
- Sertifikasi Ahli Muda
- Kegiatan Update Profil Jasa Konstruksi

**5. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota, dengan kegiatan :**

- Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan
- Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat
- Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang Yogyakarta
- Pembangunan Prasasti APDN Lama
- Pembangunan Gedung di Kawasan Monumen Bela Negara
- Dukungan Penyelenggaraan Hari Pers Nasional

- Rekonstruksi Bangunan Pasca I
- Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita & KB Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung DPKD (Samsat)
- Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan (Lanjutan)
- Retrofit Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pengadaan Interior dan Furniture Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
- Pembangunan Gedung UPTD Balai Koperasi Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Bukittinggi
- Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol
- Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat
- Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara
- Pembangunan Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Pengadaan Interior dan Furniture Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Tambahan Garase Rumah Dinas Gubernur
- Pembangunan Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Pembangunan dan Interior Guest House Gubernur
- Pembangunan Gedung Mess VVIP di Bukittinggi
- Pembangunan Kembali Rumah Dinas TNI AD (Lanjutan)
- Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati

- Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Bukit Putus Painan
- Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Pasir Baru Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
- Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 12 Ulakan Tapakis Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman
- Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami MTsN Darul Hikmah Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat
- Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia Kab. Pasaman Barat
- Penyempurnaan Shelter Evakuasi Tsunami SMA 1 Sutra Kab. Pesisir Selatan
- Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung
- Kampanye Edukasi Publik dan PIP2B Sosialisasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara
- Pembinaan Pengelolaan Tim Ahli Bangunan Gedung ( TABG )
- Asesmen Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Kecipta Karya

## **6. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota**

- Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya dan Kebinamargaan di Provinsi Sumatera Barat
- Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat
- Workshop dan Pelatihan Air Minum Provinsi Sumatera Barat
- Pengembangan sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Regional di Provinsi Sumatera Barat Penyusunan Database Keciptakarya berbasis spasial (Sektor air minum dan sanitasi) di Prov. Sumatera Barat
- Penyusunan Rencana SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat

## **7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan kegiatan :**

- Pendampingan program Sanimas IDB dan PPSP
- Percepatan Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)

- Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan MCK yang Layak di Lingkungan Sekolah Se- Sumatera Barat
- Fasilitasi penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota
- Penyusunan studi kelayakan IPAL regional

## **8. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi**

- Pembangunan Drainase di Ruas Jalan Provinsi
- Survey Drainase lintas kabupaten/kota

## **9. Perencanaan penataan ruang**

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- Penyusunan RTR Kawasan Rawan Bencana
- Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Sumatera Barat
- Pendampingan Revisi RTRW kabupaten/kota
- Pembangunan fisik kawasan rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat
- legalisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat
- Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi
- legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi |(KSP)
- Bantuan teknis penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota
- Penyusunan Sistem Informasi KePUan dan Tata Ruang Provinsi/kabupaten/kota
- Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang
- Penyebarluasan informasi dan komunikasi penataan ruang
- Fasilitasi legalisasi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota
- Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap Penataan Ruang
- Operasional BKPRD Provinsi Sumatera Barat

## **10. Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang**

- Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota
- Pengawasan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

### **11. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :**

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

## **5.2 Indikator Kinerja**

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Target indikator kinerja pada Renstra Tahun 2016 – 2021 ditetapkan menyesuaikan dengan prioritas, sumber daya manusia serta kemampuan anggaran yang tersedia. Berikut uraian target indikator kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat :

### **a. Persentase kemandapan jalan provinsi**

Kemandapan jalan dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai kondisi minimal dari suatu ruas jalan yg diharapkan dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kemandapan jalan adalah :

- i. Kondisi jalan (Baik / sedang / rusak ringan / rusak berat )
- ii. Parameter kapasitas dan volume jalan ( macet / tidak macet )
- iii. Parameter lebar jalan ( standar minimal lebar jalan )

Adapun baseline kondisi kemandapan jalan provinsi pada Tahun 2015 adalah 91,13%. Namun dengan adanya perubahan SK mengenai Ruas Jalan Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan adanya penambahan jalan sehingga pada Tahun 2016 target kemandapan jalan provinsi adalah 69% dengan target akhir 75%. Penetapan target ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang

ada pada tahun dasar, isu-isu strategis, prioritas kebutuhan, serta ketersediaan anggaran.

b. Jumlah bangunan gedung pemerintah

Dengan kondisi awal Tahun 2015 jumlah gedung negara terbangun adalah 12 unit, maka pada Tahun 2016-2021 ditargetkan diselesaikannya 13 gedung negara lagi sehingga total rumah negara terbangun pada akhir 2021 adalah 25 unit, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
2. Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita & KB Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
3. Pembangunan Gedung DPKD (Samsat)
4. Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan (Lanjutan)
5. Retrofit Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
6. Pembangunan Gedung UPTD Balai Koperasi Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
7. Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan (Lanjutan)
8. Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
9. Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Bukittinggi
10. Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol
11. Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara (4 Gedung)

c. Jumlah bangunan strategis terbangun

Sepanjang tahun 2016-2021 ditargetkan selesainya pembangunan 13 bangunan strategis, yaitu Gedung Utama Kantor Gubernur, Gedung Kebudayaan, Main Stadium, Convention Centre, Bangunan penunjang Taman Wisata Kelok Sembilan. Gedung Bundo Kandung, Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Yogyakarta (2 gedung), Pembangunan Prasasti APDN Lama, pembangunan gedung di kawasan Monumen Bela Negara (4 gedung).

d. Jumlah rumah negara terbangun

Dengan kondisi awal Tahun 2015 jumlah rumah negara terbangun adalah 6 unit, maka pada Tahun 2016-2021 ditargetkan diselesaikannya 6 rumah negara lagi sehingga total rumah negara terbangun pada akhir 2021 adalah 15 unit,

dengan rincian 10 rumah negara merupakan Rumah Dinas TNI AD, 1 Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, dan 1 Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat, 1 Garase Rumah Dinas Gubernur, 1 Guest House Gubernur, dan Gedung Mess VVIP di Bukittinggi

e. Tempat evakuasi sementara (shelter) terbangun

Dengan kondisi awal (Tahun 2015) telah terbangunnya 4 shelter maka pada sepanjang tahun Renstra (2016-2021) ditargetkan terbangun 6 shelter, sehingga total shelter terbangun menjadi 10 unit. Adapun ke-enam shelter yang dibangun antara lain :

1. Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati
2. Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Bukit Putus Painan
3. Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Pasir Baru Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
4. Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 12 Ulakan Tapakis Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman
5. Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami MTsN Darul Hikmah Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat
6. Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia Kab. Pasaman Barat

f. Peningkatan cakupan layanan air minum

Dengan kondisi awal cakupan pelayanan air minum sebesar 68% pada Tahun 2015, target pada tahun 2021 adalah 74% penduduk terlayani air bersih.

g. Peningkatan rumah tangga bersanitasi

Peningkatan rumah tangga bersanitasi dari 72% menjadi 77%.

h. Panjang drainase terbangun

Adapun indikator dari pembangunan drainase adalah terbangunnya drainase sepanjang 20 km selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021, sehingga panjang drainase awal yaitu 0 km bertambah menjadi 25 km pada akhir tahun 2021.

## i. Kesesuaian Rencana Pembangunan dan tata ruang

Dalam menilai kinerja penataan ruang didasarkan pada tiga aspek penilaian yaitu :

- Aspek pengaturan penataan ruang
- Aspek pembinaan penataan ruang
- Aspek pelaksanaan penataan ruang

Ketiga aspek tersebut dinilai dengan beberapa kriteria dan pembobotan tertentu sehingga menghasilkan total nilai skoring dan kinerja penataan ruang. Adapun tabel kriteria dan pembobotan yang digunakan untuk menilai kinerja penataan ruang sebagai berikut :

Tabel 1 Pembobotan Kesesuaian Rencana Pembangunan dan tata ruang

No	KINERJA	Penilaian			Kinerja
		Bobot (B)	Nilai (N)	Total (B x N)	
I	ASPEK PENGATURAN	35%			
1	Penetapan Perda RTRW	10%			
2	Penetapan Perda RTR Kawasan Strategis	7%			
3	Penetapan Perda RDTR	7%			
4	Penetapan Perda Peraturan Zonasi	6%			
5	Ketersediaan Perda/Perbup/Perwali terkait bidang Penataan Ruang	5%			
II	ASPEK PEMBINAAN	20%			
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	5%			
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang	5%			
3	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4%			
4	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,50%			
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	0,50%			
6	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1%			
7	Penyebarluasan Informasi berbagai Aspek Penataan Ruang	2%			
8	Pengembangan Kesadaran dan Tanggungjawab Masyarakat	2%			
III	ASPEK PELAKSANAAN	45%			
III. A	PERENCANAAN TATA RUANG	15%			
1	Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	6%			
2	Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	4,50%			



No	KINERJA	Penilaian			Kinerja
		Bobot (B)	Nilai (N)	Total (B x N)	
3	Proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	4,50%			
III. B	PEMANFAATAN RUANG	15%			
1	Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	6%			
2	Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	4,50%			
3	Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota (RDTR)	4,50%			
III. C	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	15%			
1	Ketersediaan dokumen peraturan zonasi	5%			
2	Penerapan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	3%			
3	Pemberian izin sesuai dengan rencana tata ruang	3%			
4	Pemberian insentif dan disentif	1%			
5	Pengenaan sanksi	3%			
NILAI KINERJA					

Adapun total nilai kinerja dapat dikategorikan dengan rentang sebagai berikut :

Memuaskan (M) : 86 – 100%

Baik (B) : 70 – 85%

Cukup (C) : 55 – 69%

Kurang (K) : <55%

### 5.3 Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5.1) disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2010 – 2015, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

## BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai mana pada tabel 6.1.

Tabel 6. 1

## Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	a. Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	91,13% / 69%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
2	Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	a. Jumlah bangunan gedung pemerintah	12	13	18	21	22	24	26	26
		b. Jumlah bangunan strategis terbangun	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit
		c. Jumlah rumah negara terbangun	6 unit	9 unit	11 unit	12 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit
		d. Tempat evakuasi sementara (shelter) terbangun	4 unit	4 unit	4 unit	5 unit	7 unit	8 unit	10 unit	10 unit
3	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	a. Peningkatan cakupan layanan air minum	68%	70%	72%	74%	76%	78%	78%	80%
		b. Peningkatan rumah tangga bersanitasi	66,84%	72%	73%	74%	75%	76%	77%	77%
4	Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman	a. Panjang Drainase Terbangun	25 km	25	25	30	35	40	45	45
5	Meningkatnya kualitas kinerja penataan ruang	a. Persentase kinerja (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan) penataan ruang kab/kota	57,80%	64%	68,64%	73%	77,32%	82%	86%	86%

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2016 - 2021 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2017 Dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2017, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya cakupan layanan air minum, tersedianya TPA Sampah Regional, keterpaduan antar daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Selain hal tersebut di atas, dokumen ini juga menjadi acuan penanganan pasca gempa 2009 dalam kegiatan rehabilitasi rumah masyarakat serta rehabilitasi/retrofit/pembangunan kembali gedung perkantoran pemerintah. Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.